

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA

Iriana Auliyah

Akuntansi, Universitas Yapis Papua



©2023-Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *This study aims to analyze the effect of the competence of government officials, internal control systems, regional financial information systems on financial accountability in Jayapura City. This research was conducted at the Jayapura City Regional Office, with a planned research time from April 2022 to June 2022. This study used primary data collected directly from respondents, namely a closed questionnaire on a Likert scale with five (5) alternative answers. Based on the results of the study showed that the competence of government officials, internal control systems, regional financial information systems partially or simultaneously, affect the financial accountability of Jayapura City.*

**Keywords:** *Apparatus Competence, Internal Control System, Regional Financial Information System, and Financial Accountability.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan Kota Jayapura. Penelitian ini ditetapkan di Kantor Daerah Kota Jayapura, dengan rencana waktu penelitian dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Penelitian ini menggunakan data primer yang di himpun secara langsung dari responden yaitu berupa kuesioner tertutup berskala skala likert dengan lima (5) alternatif jawaban. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan daerah secara parsial maupun simultan, berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Kota Jayapura.

**Kata kunci:** Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendali Internal, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Keuangan.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang pesat dibuktikan dengan adanya era reformasi maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan juga otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan tentang kewenangan daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang tanggung jawab (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanat (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur berdasarkan (Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014).

Akuntabilitas terkait keuangan daerah memiliki fungsi yang begitu besar dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Atas dasar hal tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan harus dapat disajikan secara jujur dan sesuai dengan standar pelaporan yang ada agar setiap akun yang dilaporkan tidak menyesatkan pengguna informasi keuangan tersebut (Noor dkk., 2020).

Informasi atas laporan keuangan akan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* apabila informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Selain itu, informasi atas laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipercaya oleh *stakeholder* (Adriani, 2010).

Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan ini wajib dilaksanakan agar akuntabilitas laporan keuangan dapat diterima (PP No. 71, 2010).

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004).

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum, 2018).

Menurut Fatmala (2014) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, adapun fenomena yang terjadi pada Provinsi Papua dan terlebih fokus terhadap Kota Jayapura yang disampaikan oleh organisasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Informasi tersebut mencakup tentang Aspek Akuntabilitas di delapan daerah Provinsi Papua. "Indeks akuntabilitas daerah masih berada dalam kategori tidak akuntabel (0-0,25) dan kurang akuntabel (0,26-0,50)," Penjelasan dari Yenti Nurhidayat (Pihak FITRA) (Maryono, 2021).

Menurut penjelasan Pihak FITRA bahwa skor akuntabilitas paling tinggi hanya 0,27 (27%), yaitu Jayapura dan Merauke. Sementara enam daerah lainnya yaitu Papua 0,26 (26%), Sorong 0,20 (20%), Raja Ampat 0,17 (17%), Papua Barat 0,12 (12%), Fak-Fak 0,10 (10%), dan Tambora 0 (0%). Kendati laporan keuangan mayoritas daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, kata Yenti (FITRA), rendahnya indeks akuntabilitas karena "tidak ditemukan adanya informasi terkait adanya wahana untuk masyarakat terlibat di dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban." Di samping itu, pihak FITRA juga tidak menemukan informasi soal adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat (Maryono, 2021).

Kemudian terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntabilitas yang menjadi acuan pada penelitian ini, yakni Noor dkk. (2020), Matani dan Hutajulu (2020), Wahyuni dan Afroh (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern dan sistem informasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, Yulianti dan Riharjo (2020), Pahlawan dkk. (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kompetensi Aparatur Pemerintah

Menurut Wibowo (2014:320) kompetensi aparatur adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, perlu memperhatikan kompetensi aparatur pemerintah (Noholo, 2021).

### Sistem Pengendali Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum, 2018).

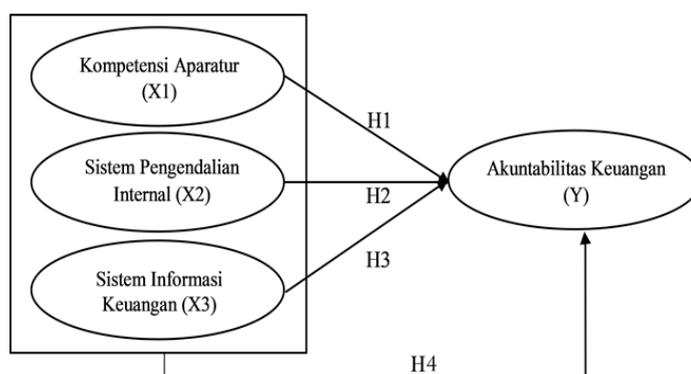
### Sistem Informasi Keuangan Daerah

Menurut Fatmala(2014)Sistem InformasiKeuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

### Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answeraility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakebebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya(Setiyono, 2014).

## KERANGKA PENELITIAN



Hasil penelitian Puspa dan Prasetyo (2020) bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Noor dkk, 2020), (Matani & Hutajulu, 2020), (Yuliastuti & Riharjo, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga pada penelitian ini hipotesis yang penulis diajukan adalah:

Hipotesis 1. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah di Kota Jayapura. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asmara (2021), secara empiris membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah, juga didukung hasil penelitian (Noor dkk, 2020), (Matani & Hutajulu, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021), (Zulkifli dkk, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Pada penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah di Kota Jayapura. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri, Djumali, dan Hartono (2019) secara empiris membuktikan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang juga di perkuat dengan hasil penelitian oleh (Noor dkk, 2020) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Maka penulis menetapkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah di Kota Jayapura.

Hipotesis 4. Secara simultan kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan daerah, terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah di Kota Jayapura.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kuantitatif Rancangan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara obyektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indicator (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif, mengupas seluruh variabel yang diamati serta menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis metode verifikatif dilaksanakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji dengan statistika (Solimun dkk., 2017). Analisis verifikatif untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dengan mengumpulkan data dari lapangan tentang seluruh variabel yang diteliti. Uji regresi linier ganda digunakan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Jayapura dengan jumlah yaitu 35 instansi. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linier ganda, dengan tahap awal melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, Uji linieritas. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan SPSS IBM 25. Dengan demikian dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terika

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikutnya dalam deskriptif variable akan dijelaskan masing-masing yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan sebagai berikut :

Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Hasil analisis data dimaknai dengan benar.

Tabel 1 Deskriptif Penelitian Variabel Kompetensi Aparatur

Item	Skor Jawaban Responden										Rata-rata / Item
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X <sub>1.1</sub>	0	0,0	1	1,0	10	9,5	42	40,0	52	49,5	4,38
X <sub>1.2</sub>	0	0,0	0	0,0	0	0,0	36	34,3	69	65,7	4,66
X <sub>1.3</sub>	9	8,6	7	6,7	36	34,3	30	28,6	23	21,9	3,49

Rata-Rata Keseluruhan	4,17
-----------------------	------

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan 4,17 yang dapat dikategorikan baik. Hal ini berarti responden cenderung setuju dengan pernyataan pada kompetensi aparatur. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kedua yakni item X<sub>1.2</sub> yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,66.

Tabel 2 Deskriptif Penelitian Variabel Sistem Pengendalian Internal

Item	Skor Jawaban Responden										Rata-rata / Item
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X <sub>2.1</sub>	1	1,0	3	2,9	31	29,5	41	39,0	29	27,6	3,90
X <sub>2.2</sub>	4	3,8	3	2,9	33	30,4	34	32,4	31	29,5	3,81
X <sub>2.3</sub>	0	0,0	4	3,8	32	30,5	41	39,0	28	26,7	3,89
X <sub>2.4</sub>	0	0,0	6	5,7	24	22,9	52	49,5	23	21,9	3,82
X <sub>2.5</sub>	2	1,9	1	1,0	8	7,6	47	44,8	47	44,8	4,30
Rata-Rata Keseluruhan											3,95

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan 3,95 yang dapat dikategorikan baik. Hal ini berarti responden cenderung setuju dengan pernyataan pada Sistem Pengendalian Internal. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kelima yakni item X<sub>2.5</sub> yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,30

Tabel 3 Deskriptif Penelitian Variabel Sistem Informasi Keuangan

Item	Skor Jawaban Responden										Rata-rata / Item
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X <sub>3.1</sub>	0	0,0	0	0,0	3	2,9	51	48,6	51	48,6	4,46
X <sub>3.2</sub>	1	1,0	3	2,9	25	23,3	54	51,4	22	21,0	3,89
X <sub>3.3</sub>	0	0,0	3	2,9	4	3,8	52	49,5	46	43,8	4,34
Rata-Rata Keseluruhan											4,23

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan 4,23 yang dapat dikategorikan baik. Hal ini berarti responden cenderung sangat setuju dengan pernyataan pada Sistem Informasi Keuangan. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item ketiga yakni item X<sub>3.3</sub> yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,34.

Tabel 4 Deskriptif Penelitian Variabel Akuntabilitas Keuangan

Item	Skor Jawaban Responden										Rata-rata / Item
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y <sub>1.1</sub>	0	0,0	8	7,6	39	37,1	47	44,8	11	10,5	3,58
Y <sub>1.2</sub>	0	0,0	0	0,0	3	2,9	51	48,6	51	48,6	4,46
Y <sub>1.3</sub>	1	1,0	3	2,9	25	23,8	54	51,4	22	21,0	3,89
Y <sub>1.4</sub>	0	0,0	3	2,9	4	3,8	52	49,5	46	43,8	4,34
Rata-Rata Keseluruhan											4,07

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai rata-rata (mean) variabel Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebesar 4,07. Hal ini berarti responden cenderung setuju dengan pernyataan pada Akuntabilitas Keuangan. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kedua yakni item Y<sub>1.2</sub> yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,46.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	rhitung	Sig.	Ket.
Kompetensi Aparatur (X1)	X <sub>1.1</sub>	0,872	0,000	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,854	0,000	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,792	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	X <sub>2.1</sub>	0,811	0,000	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,803	0,000	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,845	0,000	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,806	0,000	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0,580	0,000	Valid
Sistem Informasi Keuangan (X3)	X <sub>3.1</sub>	0,863	0,000	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,903	0,000	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,801	0,000	Valid
<b>Akuntabilitas Keuangan (Y)</b>	Y <sub>1.1</sub>	0,833	0,000	Valid
	Y <sub>1.2</sub>	0,850	0,000	Valid
	Y <sub>1.3</sub>	0,868	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki *probabilitas* seluruh instrumen sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka data instrumen dalam penelitian dikatakan valid

Tabel 6 Nilai Variabel Independen Factor

Variabel	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur	0,730	1,667
Sistem Pengendalian Internal	0,750	1,540
Sistem Informasi Keuangan	0,820	1,229

Dari nilai toleran dan nilai VIF ketiga variabel terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance yang mendekati 1 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	13,147			
Kompetensi Aparatur	1,608	4,040	0,000	Berpengaruh
Sistem Pengendalian Internal	0,837	4,127	0,000	Berpengaruh
Sistem Informasi Keuangan	2,506	2,444	0,000	Berpengaruh
<i>RSquare</i>	0,992			
<i>AjustedR Square</i>	0,992			
T tabel	1,983			
F hitung	96,153			
F tabel	2,30			

Dari hasil uji regresi yang tampak pada tabel 7 di atas diketahui nilai konstanta sebesar 13,147 dan nilai signifikan hasil uji regresi variabel kompetensi aparatur pemerintah (X1) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 1,608 atau sebesar 160,8% dengan signifikansi 0,000 atau lebih besar dari alpha 0,05. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X2) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 0,837 atau sebesar 83,7% dengan signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari alpha 0,05 dan koefisien regresi variabel sistem informasi keuangan (X3) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 2,506 atau sebesar 250,6%, dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 13,147 + 1,608 X1 + 0,837 X2 + 2,506 X3$$

Hasil uji hipotesis terlihat bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah (X1) diperoleh thitung sebesar 4,040 lebih besar dari ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini artinya variabel kompetensi aparatur pemerintah dapat menerangkan variabel akuntabilitas keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 1,608 atau 160,8%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.

Selanjutnya variabel sistem pengendalian internal (X2) diperoleh thitung sebesar 4,127 lebih besar dari ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini artinya variabel sistem pengendalian internal dapat menerangkan variabel akuntabilitas keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 0,837 atau 83,7%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.

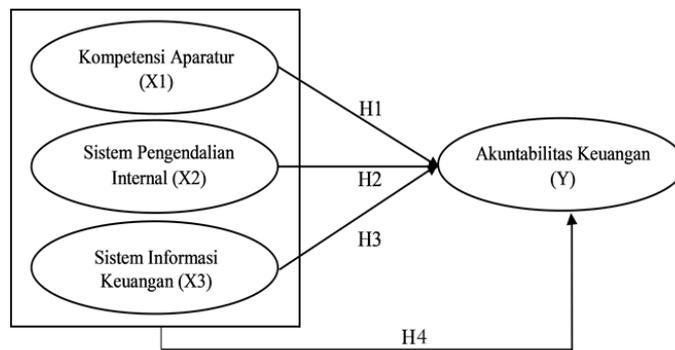
Kemudian variabel sistem informasi keuangan (X3) diperoleh thitung sebesar 2,444 lebih besar dari ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini artinya variabel sistem informasi keuangan dapat menerangkan variabel akuntabilitas keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 2,506 atau 250,6%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dibuktikan nilai Fhitung sebesar 96,153 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,30 dan besarnya nilai signifikan 0,000. Karena signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan

sistem informasi keuangan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan maka akan mendorong pegawai untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan secara bersama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, dapat diterima.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Nilai koefisien determinasi nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,992 atau 99,2%. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura dapat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan sebesar 99,2%, sedangkan sisanya sebesar 0,8% dipengaruhi oleh variabel- variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambar 2 hasil penelitian sebagai berikut:



### ***Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura

Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang artinya sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai- nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan refleksi kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004) seseorang yang memiliki kompetensi yang baik akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Kompetensi Aparatur berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa setiap personal Aparatur merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai ide keilmuan untuk pencapaian tujuan organisasi. Ide keilmuan ini berasal dari tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman, dan pelatihan Handayani dkk, (2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Handayani dkk, (2020), Matani and Hutajulu, (2020), (Yuliasuti & Riharjo, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

#### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang artinya sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan merefleksikan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004) seseorang yang memiliki kompetensi yang baik akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Kompetensi Aparatur berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa setiap personal Aparatur merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai ide keilmuan untuk pencapaian tujuan organisasi. Ide keilmuan ini berasal dari tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman, dan pelatihan Handayani dkk, (2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Handayani dkk, (2020), Matani and Hutajulu, (2020), (Yuliasuti & Riharjo, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

#### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dalam sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum, 2018).

Sistem pengendalian internal memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting, ketika sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap proses yang terkait pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini memungkinkan pemerintah dapat membuat laporan keuangannya lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun, jika sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah tidak dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka pelaporan yang dihasilkan, tidak dapat memberikan kualitas pelaporan yang baik dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan menurun.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu (Matani & Hutajulu, 2020), (Wahyuni & Afroh, 2021), (Zulkifli dkk, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

### ***Sistem Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah sangat penting di dalam pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Selain itu, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan sistem pendokumentasikan, pengadministrasian, serta pengelolaan data keuangan daerah serta bisa sebagai informasi yang disajikan pada masyarakat yang bisa dipergunakan pengambilan keputusan pada sebuah pelaksanaan, perencanaan, dan pelaporan pada pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. (Handayani dkk, 2020).

Menurut Fatmala, (2014) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Fathia, (2017) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi.

Penelitian ini sejalan dengan (Rianisanti, 2017), Handayani et al, (2020) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan yang telah dilakukan, adapun beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut: Terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Kemudian terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Selanjutnya terdapat sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Dan secara bersama-sama Kompetensi Aparatur Pemerintah, sistem pengendalian internal dan sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 1-13.
- Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah

- Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(1), 69-80.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengelolaan Data SPSS*.
- BKPP Kota Jayapura. (2022). *Pelatihan Kepemimpinan Administrator Oleh BKPP*. Jayapura, Maret. <http://bkppjayapurakota.id/pembukaan-pelatihan-kepemimpinan-administrator-pka-ak-i-di-ling-pemkot-jayapura-thn-2022>
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *JOM Fekon*, 4(1), 670-685.
- Faturrahman. (2020). Akuntabilitas Keuangan daerah Ditinjau dari Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKTSAR: *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 67-80.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). PT Salemba Emban Patria.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Harjaningrum, E. A., & Ardini, L. (2021) Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1-25.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 1). Center For Academic Publishing Services.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2018). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-15.
- Lane, J.-E. (2003). *Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework* (Working paper).
- Mansyuer, YT. Y., & Efendi, D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1-18.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018b). *Undang-undang nomor 28 tahun-2007*. Yogyakarta:CV.Andi,. <http://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Martani, D. (2014). *Akuntansi Keuangan menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat.
- Maryono. (2021). *Transparansi Pemerintahan Masih Jadi PR di Papua*. Infoanggaran.com
- Matani, C. D., & Hutajulu, L. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Kampung di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(3), 21-45.
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. *Skripsi Universitas Islam Indonesian Yogyakarta*.
- Noch, M. Y., & Husein, S. (2015). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen* (M.B.H. Ibrahim (ed.)). Perdana Publishing.

- Noor, M. T., Fidiana, & Handayani, N. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negeri, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 8-29.
- Nugroho, A. (2011). *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*. Penerbit Andi.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- P.P.N. 2. T. (2004). *Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004*. 2004.
- Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (2010).
- Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
- Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2014).
- Pratiwi, S. A., Probowulan, D., & Halim, M. (2019). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah*, 1(1), 1-14.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-297.
- Puspitawati, L., & Effendy, M. M. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung). *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(1), 43-58.
- Ramadhan, W., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4), 822-835.
- Rianisanti. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Klaten). *Skripsi Akuntansi Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 14-23.
- Sari, N., & Asmara, J. A. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 142-149.
- Setiyono, B. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. CAPS.
- Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI dan Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat). *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89-105.
- Sistem Pengendalian Internal Kota Jayapura. (2022). *Pendampingan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Pemerintah Kota Jayapura*.  
<http://jayapura.karantina.pertanian.go.id/post/pendampingan-sistem-pengendalian-internal-pemerintah-spip>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 10). CV Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama.
- Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).

- Wahyuni, N., & Afroh, I. K. F. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Beuki Kabupaten Situbondo). *Business and Economics Conference in Utilization Modern Technology, 1(1)*, 126-133.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja* (Edisi 5). PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, N. D. (2021). Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 4(1)*, 128-136.
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderating. *JAAI, 1(2)*, 166-175.
- Yulianti, W., Kamaliah, & Rasuli. (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau, 27(4)*, 386-398.
- Yuliasuti, E. R., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(10)*, 1-15.
- Zulkifli, Sandrayati, & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Desa di Kecamatan Muara Enim, *Jurnal Ekonom, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi 6(1)*, 26-38.